

SKRIPSI

**PENGAWASAN BBPOM TERHADAP PENYEBARAN KOSMETIK
BERBAHAYA YANG DIJUAL SECARA ONLINE DITINJAU DARI UU
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

UNIVERSITAS ANDALAS

PUTRI KHAIRANI

1810113004

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing :

Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum

Neneng Oktarina, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 09/PK-II/II/2024

**PENGAWASAN BBPOM TERHADAP PENYEBARAN KOSMETIK
BERBAHAYA YANG DIJUAL SECARA ONLINE DITINJAU DARI UU
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PADANG**

(Putri Khairani, 1810113004, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2023)

ABSTRAK

Kosmetik merupakan hal yang penting dalam menunjang kecantikan. Pada awalnya kosmetik mempertahankan kualitas dan memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk diedarkan, namun seiring perkembangan zaman, kualitas tidak diutamakan. Banyak dari pelaku usaha tidak mementingkan kandungan yang terdapat dalam kosmetik, apalagi dengan sistem penjualan *online* pada saat ini. Pelaku usaha dengan mudah menjual produk tanpa ni BPOM serta mengandung bahan berbahaya. Hal ini merupakan bentuk penyalahgunaan yang umum terjadi pada suatu produk kosmetik, maka dari itu perlu adanya pengawasan lebih lanjut mengenai hal ini. Adapun rumusan masalah penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan kosmetik online berbahaya di Kota Padang yang dilakukan oleh BBPOM serta mengetahui hambatan dan upaya yang di alami pihak BBPOM dalam melakukan pengawasan produk. Penelitian ini menggunakan metode yuridis kualitatif yang mana didasarkan pada data yang diperoleh, berdasarkan Undang-Undang, pendapat ahli selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer berupa peraturan perundang-undangan dan sekunder dari bahan kepustakaan. Data diuraikan dalam bentuk deskriptif analitis dimana penulis menjelaskan suatu hal seperti kondisi apa adanya yang ada di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan pihak BBPOM Kota Padang terhadap penyebaran kosmetik berbahaya secara online berupa pengawasan sebelum produk di edarkan dan produk setelah diedarkan serta pengawasan saat pengujian sampel dan pendistribusian produk, selanjutnya hambatan yang dialami pihak BBPOM antara lain : kurangnya kesadaran masyarakat mengenai produk berbahaya, masyarakat sulit diajak kerja sama dalam pengawasan serta adanya intervensi yang membuat proses pengawasan terhambat. Upaya yang dilakukan pihak BBPOM terhadap itu adalah dengan melakukan sosialisasi terhadap produk yang layak diedarkan serta pihak BBPOM melakukan kerja sama dengan aparat yang berwenang. Ditinjau dari UU no 8 Tahun 1999 efektifitas UU dipengaruhi juga oleh peran aktif dari masyarakat dan pemerintah sekitar, saat ini BPOM Kota Padang sudah efektif dalam mengawasi penyebaran kosmetik online berbahaya di Kota Padang

Kata Kunci: Pengawasan BBPOM, Perlindungan Konsumen, Kosmetik Online, UU Perlindungan Konsumen